



Perwujudan Program “Menuju UMKM Naik Kelas” di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo

¹Imro'atul Fadilla, ²Firly Erysa Faldilal Nuraini, ³Suci Rohmatul Rizky, ⁴Shanella Oktabilla Timoriawan, ⁵Riska Febrian, ⁶Yovie Oktavia, ⁷Ubaidillah, ⁸Fina Martcelina, ⁹Ahmad Yusuf Habibur Rouf, ¹⁰Ganes Aurora Santoso

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} UPN “Veteran” Jawa Timur; Surabaya, +62 (031)8706369, Jl.Raya Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

e-mail: ¹21041010061@student.upnjatim.ac.id, ²21041010134@student.upnjatim.ac.id,

³21013010031@student.upnjatim.ac.id, ⁴21013010085@student.upnjatim.ac.id,

⁵21011010015@student.upnjatim.ac.id, ⁶21043010045@student.upnjatim.ac.id,

⁷21032010101@student.upnjatim.ac.id, ⁸21035010019@student.upnjatim.ac.id,

⁹21035010065@student.upnjatim.ac.id, ¹⁰21033010040@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola usaha melalui tiga fokus utama Perbaikan data Nomor Induk Berusaha (NIB), penggunaan aplikasi SIAPIK dalam pembukuan, dan penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP). Program ini dilaksanakan di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo dengan melibatkan 20 pelaku UMKM. Tujuan dari kegiatan ini adalah para pelaku UMKM paham akan pentingnya dan bagaimana cara perbaikan dalam NIB, teknik pencatatan keuangan yang efisien menggunakan aplikasi SIAPIK, serta metode akurat dalam perhitungan HPP untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku UMKM Desa Bluru Kidul. Hasil dalam kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam Perbaikan data Nomor Induk Berusaha (NIB), penggunaan aplikasi SIAPIK dalam pembukuan, dan penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang dapat meningkatkan daya saing dan profesionalisme usaha. Para pelaku UMKM juga merasakan manfaat praktis dari penerapan materi sosialisasi dan pelatihan dalam kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan profitabilitas.

Kata Kunci : NIB ; SIAPIK; HPP

Abstract

The implementation of this community service aims to increase the capacity and ability of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in managing businesses through three main focuses: Improving Business Identification Number (NIB) data, using the SIAPIK application in bookkeeping, and determining the Cost of Goods Sold (HPP). This program was implemented in Bluru Kidul Village, Sidoarjo District, involving 20 MSME actors. The aim of this activity is for MSME players to understand the importance and how to improve NIB, efficient financial recording techniques using the SIAPIK application, as well as accurate methods for calculating COGS to determine competitive selling prices. The method used in this activity is to carry out outreach and training to MSME actors in Bluru Kidul Village. The results of this activity show an increase in the understanding and skills of MSME players in improving Business Identification Number (NIB) data, using the SIAPIK application in bookkeeping, and determining the Cost of Goods Sold (HPP) which can increase business competitiveness and professionalism. MSME players also experience practical benefits from implementing outreach and training materials in facilitating access to financing and increasing profitability.

Keywords : NIB; SIAPIK; HPP

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam kegiatan perekonomian mulai dari skala daerah hingga nasional. Harini dkk. (2023) menjelaskan bahwa pengembangan UMKM dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Keberadaan UMKM menurut Wibowo dan Zainul (2015) dapat membantu memulihkan ekonomi sehingga sering dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara. Sektor UMKM di Indonesia menyumbang Produk Domestik Bruto hingga mencapai 56,7% (Wiralestari dkk., 2018).

Hambatan utama yang umumnya dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang legalitas hukum dalam menjalankan usahanya. Legalitas hukum seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan hal yang sangat penting pada pelaku UMKM karena dapat memberikan akses ke berbagai fasilitas pemerintah, dan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, sehingga UMKM sering mengalami kesulitan untuk bersaing dalam pasar luas apabila tidak memiliki legalitas hukum (Harini dkk., 2023).

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, seperti adanya pembukuan yang tersistem. Pembukuan tersistem bertujuan untuk memantau arus kas dan mengevaluasi kinerja usaha sehingga pelaku usaha UMKM dapat lebih mudah membuat keputusan berdasarkan data yang lebih akurat (Rivai, 2013). Namun, realitasnya masih banyak pelaku UMKM yang mengabaikan pembukuan dan mencatat detail aliran kas usaha, hal ini tentu berdampak sangat merugikan bagi usaha hingga dapat mengancam keberlanjutan suatu usaha (Sukaris dkk., 2022).

Pelaku UMKM juga sering mengabaikan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) untuk menentukan harga jual produk sehingga harga yang ditawarkan cenderung lebih tinggi. Perhitungan HPP pada suatu usaha dapat bermanfaat sebagai pedoman dasar pelaku UMKM dalam menentukan harga jual produk per unit dengan menambahkan keuntungan yang diinginkan (Hertati dkk., 2022). Perhitungan HPP yang tepat akan memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan Perusahaan, keuntungan yang diinginkan dapat dihitung bersamaan dengan harga pokok produksi yang telah ditetapkan.

Desa Bluru Kidul merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang cukup banyak warganya bekerja sebagai pelaku UMKM dengan jumlah sekitar 1.000 UMKM di desa tersebut yang terorganisasi dalam suatu komunitas UMKM bentukan pemerintah desa setempat, yaitu Bluru Bangkit Sidoarjo (BBS) dengan jumlah anggota lebih dari 500 UMKM. Legalitas, pencatatan atau pembukuan akuntansi sederhana, dan penentuan harga jual produk menjadi salah satu permasalahan utama yang dirasakan oleh komunitas BBS. Oleh karena itu, mahasiswa KKN-T kali ini memberikan pendampingan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), pembukuan melalui aplikasi Siapik, dan penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) dengan harapan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kegiatan KKN-Tematik Bela Negara ini dilaksanakan di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2024 - 07 Agustus 2024. Salah satu program kerja yang diciptakan yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi desa merata dengan tema kegiatan "Menuju UMKM Naik Kelas". Tahap pertama yang dilakukan adalah bekerja sama dengan komunitas UMKM yang dibentuk oleh pemerintah desa setempat yaitu Bluru Bangkit Sidoarjo (BBS), dengan tujuan untuk mempermudah dalam mencari audiens. Bentuk kegiatan yang digunakan yaitu dengan metode praktik secara langsung berupa sosialisasi guna memberikan pemahaman audiens mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), pembukuan melalui aplikasi SIAPIK, dan penentuan Harga Pokok Produksi (HPP). Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, terdapat posko pelayanan NIB yaitu

Fadilla 1, Nuraini 2, Rizky 3, Timoriawan 4,
Febrian 5, Oktavia 6, Ubaidillah 7, Martcelina 8,
Rouf 9, Santoso 10

mahasiswa memberikan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM yang difokuskan pada perbaikan data, karena sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki NIB. Posko pelayanan NIB tersebut dilaksanakan dalam 3 hari yaitu pada 31 Juli 2024- 02 Agustus 2024 pukul 09.00 - 12.00 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sosialisasi dan Posko Perbaikan Data NIB

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengenalan mengenai NIB dan *website Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). OSS-RBA merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun untuk mendukung proses pengajuan dan perizinan berusaha. Aplikasi ini menyediakan informasi berupa data perizinan yang ada, data permohonan usaha, data perizinan daerah, dan data instansi daerah. Perizinan usaha ini mencakup badan usaha maupun perseorangan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar, Sistem OSS ini tersedia untuk dapat diakses oleh semua orang sehingga memudahkan pengurusan berbagai jenis perizinan usaha.

Para peserta yang merupakan anggota dari komunitas BSS hampir seluruhnya memiliki NIB. Permasalahan legalitas yang ditemukan setelah adanya analisis dan observasi lapangan adalah berupa kurangnya pemahaman UMKM dalam mengajukan penambahan bidang usaha dan perbaikan data pada aplikasi OSS. Sosialisasi dibuka dengan pengenalan pentingnya NIB bagi pelaku usaha UMKM yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 201 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemapar kemudian menjelaskan mengenai alur pembuatan NIB mulai dari pendaftaran produk UMKM pada laman OSS kemudian memasukkan data diri meliputi nama, NIK, alamat, bidang usaha, lokasi, nomor, dan NPWP (jika ada). Lembaga OSS akan menerbitkan NPWP setelah semua persyaratan telah diinputkan. Materi kemudian dilanjutkan dengan tahapan perbaikan data bagi UMKM yang telah terdaftar pada OSS.

Kelompok KKN-T Bela Negara kemudian membuka posko pelayanan NIB yang difokuskan pada perbaikan data, karena sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki NIB. Posko ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam memperbaiki dan memperbarui data mereka agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Mahasiswa memberikan pendampingan langsung dalam proses perbaikan data, mulai dari verifikasi informasi hingga pengisian ulang data yang diperlukan. UMKM diharapkan dapat menjaga keakuratan data dan memanfaatkan NIB secara maksimal untuk perkembangan usaha dengan adanya posko pelayanan ini. Posko ini juga berfungsi sebagai wadah konsultasi bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami sistem OSS dan pentingnya memiliki data yang valid dan *up-to-date*.

b. Sosialisasi Pembukuan melalui SIAPIK

Bank Indonesia berkolaborasi dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk mengembangkan inovasi dalam bentuk aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android yang dapat diakses melalui smartphone dan desktop. Aplikasi dengan nama SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) yang dirancang untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai referensi bagi bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan untuk UMKM (Caniago, Siregar, dan Meilina 2022). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, tepatnya di Aula Balai Desa Bluru Kidul. Acara tersebut berupa sosialisasi dengan judul "Menuju UMKM Naik Kelas," yang ditujukan kepada 20 ibu-ibu pelaku UMKM di Desa Bluru Kidul.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, baik yang baru memulai maupun yang sudah beroperasi, dalam menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi SIAPIK. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan UMKM memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan dengan mempraktikkan langsung aplikasi SIAPIK (Fauzan dan Febriyan 2024). Selama kegiatan, para peserta diberikan pengenalan teori

dan praktik, sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang pencatatan transaksi keuangan serta keterampilan dalam menyajikan laporan laba atau rugi usaha.

Aplikasi SIAPIK dirasa sangat membantu dalam efektivitas UMKM, dimana para pelaku UMKM yang sebelumnya tidak familiar dengan teknologi merasa terbantu dengan fitur user-friendly dari aplikasi yang dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan. Aplikasi SIAPIK membantu dalam memastikan data keuangan tercatat dengan akurat dan konsisten. Aplikasi ini secara signifikan membantu meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan keuangan UMKM, yang dapat meningkatkan peluang mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Kendala yang dihadapi para pelaku dalam penggunaan Aplikasi SIAPIK seperti halnya beberapa pelaku mengalami kesulitan teknis, pelaku tidak terbiasa dengan teknologi digital merasa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan dan pelaku usaha dengan pengetahuan akuntansi yang terbatas kesulitan memahami konsep konsep keuangan yang digunakan dalam aplikasi. Solusi yang ditawarkan oleh para pengabdian yaitu dengan menyediakan panduan teknis langkah demi langkah dalam format cetak dan video untuk membantu pelaku mengatasi masalah dan memberikan softfile pembelajaran dasar dalam pembelajaran akuntansi dasar dalam pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan yang diterapkan dalam aplikasi.

Dampak panjang penggunaan Aplikasi SIAPIK oleh para pelaku UMKM, Dengan pencatatan keuangan yang lebih akurat dan transparan, UMKM dapat membangun kepercayaan dengan pihak ketiga, termasuk investor dan lembaga keuangan. Hal ini dapat meningkatkan peluang akses pembiayaan dan investasi untuk pertumbuhan bisnis. Aplikasi SIAPIK menyediakan data keuangan yang real-time dan dapat diandalkan, yang memungkinkan pemilik UMKM membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Penggunaan aplikasi SIAPIK dapat membantu pemilik UMKM meningkatkan kapasitas manajerial mereka dengan memberikan wawasan yang lebih baik tentang arus kas, profitabilitas, dan kinerja keseluruhan bisnis. Dengan lebih sering menggunakan aplikasi ini, pemilik UMKM akan menjadi lebih sadar akan pentingnya manajemen keuangan yang baik, yang dapat meningkatkan disiplin finansial dan mengurangi risiko kesalahan pengelolaan dana.

c. Sosialisasi Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP)

Dalam bidang akuntansi, harga pokok produksi (HPP) merujuk kepada semua biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperoleh dan memproses bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi yang dimaksud adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (Hartati dkk, 2021).

Sosialisasi penentuan harga pokok produksi (HPP) memiliki tujuan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dalam proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap digunakan dan dijual. Penentuan harga pokok produksi (HPP) sangat penting bagi pemilik usaha atau UMKM, hal tersebut karena termasuk salah satu elemen yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan besarnya laba. Dengan memahami dan mengelola harga pokok produksi (HPP) secara efektif, sebuah pemilik usaha dapat meningkatkan efisiensi produksi, menetapkan harga jual yang kompetitif, dan memastikan kelangsungan bisnisnya. Terlebih untuk pelaku usaha atau UMKM Desa Bluru Kidul yang mana salah satu masalah utama yang dihadapi yaitu mengenai perhitungan HPP yang kurang diimplementasikan.

Dalam penetapan harga pokok produksi (HPP) terdapat dua metode yang bisa digunakan yaitu metode harga pokok penuh (Full Costing) dan metode harga pokok variabel (Variable Costing). Metode harga pokok penuh (Full costing) yaitu memperhitungkan semua biaya produksi untuk menentukan HPP seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sedangkan, metode harga pokok variabel (Variable Costing) hanya mempertimbangkan biaya produksi yang bersifat variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam tiga fokus utama pengelolaan usaha yaitu perbaikan Nomor Induk Berusaha (NIB), penggunaan aplikasi SIAPIK untuk pembukuan, dan penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP). Melalui kegiatan ini para pelaku UMKM menyadari pentingnya kesesuaian akan legalitas usaha dalam data NIB, yang membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan dan pasar. Aplikasi SIAPIK menjadi pilihan yang efektif dalam membantu pelaku UMKM mengelola pencatatan keuangan dengan lebih efisien dan akurat. Pemahaman yang lebih baik tentang HPP membuat pelaku UMKM dapat menentukan harga jual yang lebih kompetitif dan dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha. Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan manajerial dan keuangan pelaku UMKM.

SARAN

Saran bagi pengabdian selanjutnya lebih digali secara rinci kebutuhan para pelaku UMKM dengan menanyakan masalah atau materi apa yang ingin dikuasai dengan lebih, sehingga UMKM Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo dapat terus berkembang dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Caniago, Indra, Nolita Yeni Siregar, dan Reva Meilina. 2022. "Pelatihan Dan Pendampingan Aplikasi Siapik Pada Pelaku Umkm Pemula Di Bandar Lampung." *Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat* 4(01): 40–47.
- [2] Fauzan, Muhammad, dan Azrila Febriyan. 2024. "PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI SIAPIK BANK INDONESIA DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM BINAAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO." 4(2): 1–9.
- [3] Harini, S., Aziz, A. J., Hutomo, Y. P., Febrianti, A. A., dan Khoerunnisa, S. S. (2023). Pendampingan NIB dan Pencatatan Laporan Keuangan Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Desa Kuta. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(5): 865-874.
- [4] Hartati, L., Asmawati, A., Hendarmin, R., & Syafitri, L. (2021). Pelatihan UMKM Limbah Nanas Pewarna Alami Kain Jumputan Peluang Bisnis Kearifan Lokal Masyarakat Pinggiran Era Covid-19. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 77–91.
- [5] Hertati, L., Asmawati, A., Syahfitri, L., dan Hendarmin, R. (2022). Pelatihan Peran Inovasi, E-Commerce, Ekosistem Mendorong Inovasi Produk Unggulan Desa. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1): 36–55.
- [6] Rivai, V. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktik Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Sukaris, S., Ernawati, E., Rahim, A. R., Arwantini, K. F. P., dan Fitria, N. L. (2022). Sosialisasi Pembukuan Sederhana dan Penentuan Harga Jual Produk Pada UMKM Desa Betoyoguci. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(3), 349-357.
- [8] Wibowo, D. H., dan Zainul A., S. (2015). Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1).
- [9] Wiralestari, W., Firza, E., dan Mansur, F. (2018). Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Full Costing sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Pempek pada UMKM Pempek Masayu 212. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 2(1): 46-52.